

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, terencana, menyeluruh, terpadu, terarah yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spirituil berdasarkan apa yang sudah tertuang didalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan seharusnya dilaksanakan merata diseluruh tanah air dan harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.

Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan karena kurangnya partisipasi masyarakat, keadaan ini terjadi antara lain : pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan merugikan, pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut, pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak diikuti sertakan.

Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang diperlukan dalam berinvestasi sebaiknya dari dalam negeri, agar dapat mengurangi jumlah utang negara, sumber pendapatan negara dapat berasal dari penghasilan dari perusahaan-perusahaan negara, penghasilan dari barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah atau barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai barang pajak. Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan balas jasa langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

Dari definisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu sumber penerimaan negara (fungsi budgeter).

Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak menempati persentase yang paling tinggi dibandingkan sumber penerimaan negara yang lain. Hal ini menggeser dominasi penerimaan minyak dan gas, yang pada pertengahan dekade 1970 sampai tahun 1980-an menempati porsi yang paling tinggi dari penerimaan negara. Oleh sebab itu saat ini pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara.¹

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya akan dilimpahkan kepada daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. PBB sektor pedesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Dengan dijadikannya PBB pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan asli daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan.

Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. PBB merupakan pajak yang potensial, karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib pajak PBB lebih besar dibanding pajak-pajak lainnya.

¹ Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm.2

Perilaku wajib pajak terhadap kesederhanaan dan jangkauan hukum pajak akan mempengaruhi perilaku dan sikap wajib pajak dan keberhasilan perpajakan. Peraturan perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan berfungsi penting, karena ini merupakan sikap wajib pajak terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan.²

Selanjutnya, ada salah satu hadits yang menerangkan tentang pajak,

Artinya : *Sesungguhnya Nabi SAW ketika menghadap kepada mu'adz ke yaman nabi memerintahkannya untuk mengambil dari tiap-tiap orang dewasa satu dinar atau sepadannya dari pakaian yaman.*³

Kaidah-kaidah beban pajak menurut perspektif ekonomi yaitu : Kaidah keadilan dan persamaan(perlindungan pemerintah untuk masyarakat dalam menutupi beban pajak harus sesuai dengan kemampuan dan ketentuannya, dan inilah yang dimaksud bahwa membayar pajak itu wajib disesuaikan dengan kemampuan keuangan) kaidah kepercayaan dan keyakinan(wajib pajak harus didorong untuk tertib memenuhi kewajibannya dengan membayar tepat pada waktunya), kaidah keselarasan (pajak itu sesuai dengan kondisi muslim mukallaf, khususnya yang berkaitan dengan batasan waktu dan sebab-sebab penarikan pajak, kaidah ekonomi/ moderasi (kaidah ini menghendaki agar sikap pemborosan dan upaya maksimal dalam memperoleh hasil pajak atau sarana lain dalam perpajakan.

Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan

² Laily Fauziyah, *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 46

³ Al Imam Takiyudin Abi Bakar bin Muhammad Al Khusaini Al Hisni Al Damisqi As Syafi'i, *Kifayatul Akhyar Juz.2*, Muhammad bin Akhmad bin Nabhan Wa auladiah, Surabaya, hlm.217

untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Salah satu prinsip pemungutan dalam sejarah islam yaitu besar pajak ditetapkan sesuai dengan status si pembayar dan tidak boleh melebihi kesanggupannya, sedangkan sikap adalah suatu keyakinan, kebiasaan, pendapat atau konsep, dan motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Disinilah sikap dan motivasi diperlukan guna meyakinkan wajib pajak untuk mencapai tujuannya dalam membayar pajak secara tunai dan memperoleh hasil pajak bagi petugas pajak.

Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang. Di mana berarti semakin tinggi kemakmurannya seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. Oleh karena itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi. Pemerintah sudah melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap objek yang dikenakan pajak. Pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Masyarakat yang sudah menjadi Wajib pajak, perlu ikut serta dalam upaya membayar pajak dengan upaya mengetahui pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan bagi pembangunan suatu daerah tersebut.

Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati merupakan salah satu desa yang berperan penting terutama dalam pembangunan suatu daerah, melalui partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan sebagai perwujudan kemandirian di daerah tersebut. Desa Asempapan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2823 jiwa, laki-laki 1360 dan perempuan 1463. Dengan jumlah SPPT sebanyak 1417, jumlah pokok pajak tahun 2016 Rp 52.662.097. Pada awalnya, Pajak bumi dan bangunan di Desa Asempapan dilakukan dengan cara penarikan langsung langsung *door to door* oleh aparat. Akan tetapi hal ini kurang berhasil dikarenakan pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) banyak yang jatuh tempo. Sehingga usaha pemerintah desa mengganti cara penarikan pajak dengan cara memotong harga nilai girik pada setiap terjadi lelang bondu desa(hak milik rakyat). Tetapi kalau warga desa Asempapan yang tidak memiliki girik Ex Norowito dalam arti sudah pindah hak milik(dalam arti dijual) aparat desa datang *door to door*, untuk menarik pajak.

Tabel 1.1

Pemerintahan Kabupaten Pati
 Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah
 Jl. Setya Budi No.34 Telp (0295) 381931 Fax.383552
 Propinsi = 33-Jawa Tengah
 Data II = 18-Pati
 Kecamatan = 210- Trangkil
 Kelurahan = 016-Asempapan
 Jumlah SPPT sebanyak = 1417
 Jumlah pokok Pajak tahun 2016 Rp 52.662.097

Buku	Jumlah Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Pokok Ketetapan
1.	1.329	1.481.481	27.779	35.261.028
2.	86	876.931	2.795	15.184.669
3.	2	67.800	0	2.216.400
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
Jumlah	1.417	2.426.212	30.574	52.662.097

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Muslim di Desa Asempapan Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**”.

B. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman dan menjaga agar tidak terjadi kesalahan pemahaman tentang judul skripsi ini maka di perlukan penegasan istilah. Adapun istilah yang dimaksud antara lain :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁴

2. Sikap

Sikap (*attitude*) adalah evaluasi kepercayaan (*belief*) atas perasaan seseorang untuk berperilaku.⁵

3. Motivasi

Motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut.⁶

4. Partisipasi

Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah tidak akan tercapai atau bisa mengalami kegagalan.⁷

5. Pajak Bumi dan Bangunan

Pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk kepada pemerintah dan jenis pajak yang dikenakan terhadap obyek pajak, berupa bumi dan/atau bangunan.⁸

⁴ Kementerian Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2011, hlm 400

⁵ Riana widiastruti, et.al. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan*, Diponegoro Journal Of Accounting, volume 3, Nomor 2, 2014, hlm 6

⁶ Hasibuan M.S.P, *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm 92

⁷ Frengki C H Siahaan, *Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kota Semarang*, UNDIP, Semarang, 2010, hlm. 10

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Jakarta, 2011, hlm. 385

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap masyarakat muslim di Desa Asempapan berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ?
2. Apakah motivasi masyarakat muslim di Desa Asempapan berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dinyatakan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap masyarakat muslim di Desa Asempapan terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi masyarakat muslim di Desa Asempapan terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memperoleh hasil yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah pengalaman serta pengetahuan khusus tentang cara penulisan skripsi yang baik dan sekaligus untuk melatih penulis agar dapat menetapkan suatu permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan masukan kepada wajib pajak muslim sebagai tambahan informasi untuk meningkatkan partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan.

F. Batasan Penelitian

Berdasarkan uraian yang tertulis dalam latar belakang masalah, ada beberapa dimensi sikap dan motivasi masyarakat muslim di Desa Asempapan terhadap partisipasi masyarakat muslim terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Untuk itu penulis memberi batasan masalah yang meliputi:

1. Obyek penelitian yaitu Wajib Pajak di Desa Asempapan.
2. Yang diteliti adalah pengaruh sikap dan motivasi masyarakat muslim di Desa Asempapan terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun :

1. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraks, halaman daftar isi dan daftar tabel.

2. Bagian Isi, meliputi :

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lain yang saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengertian sikap, motivasi, pajak, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, tata variabel penelitian, definisi operasional, tehnik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran umum responden, analisis data serta pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi : daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.